

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI TERHADAP PERATURAN DAERAH
KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 02 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF FIQH
SIYASAH DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA**

**(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung)**

Skripsi

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

AL APID

NPM: 1521020007

Program Studi: Siyasa Syar 'iyyah



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

1441 H / 2020 M

**Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
Anak perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif di Indonesia
(Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota
Bandar Lampung)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

AL APID

NPM: 1521020007

Program Studi: Siyasah Syar'iyyah

Pembimbing I : Prof.Dr.H.Moh. Mukri, M.Ag.

Pembimbing II : Dr. Liky Faizal S.Sos, M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H/ 2020 M**

ABSTRAK

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta yang lainnya. Karena itu, anak adalah amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dalam perkembangan anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa anak-anak. Walaupun Undang-undang Perlindungan Anak telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan, eksploitasi, kekerasan seksual, diskriminasi dan penelantaran anak tetap saja berani melakukan aksinya.

Oleh karena itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan Rumusan masalah: Mengapa implementasi Peraturan Daerah kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak belum Efektif, Apa faktor pendorong dan penghambat penyelenggaraan perlindungan anak di kota Bandar Lampung, kemudian bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kota Bandar Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), dengan sifat penelitian *deskriptif*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara *kualitatif*. Berdasarkan pengamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung bahwasannya pemerintah sudah melaksanakan Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak melalui program kerja semaksimal mungkin dalam pencegahan Perlindungan Anak. Namun kekerasan pada Anak terjadi karena faktor lingkungan keluarga serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak kota Bandar Lampung. Dalam pandangan *Fiqh Siyasah* mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam QS. An-Nisa ayat 9, bahwa praktik penyelenggaraan perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan QS. An-nisa ayat 9. Bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN


Nama : Al Apid
NPM : 1521020007
Jurusan : Siyasah Syar' iyyah (Hukum Tata Negara)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)


MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah Universitas Raden Intan Lampung.


Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Moh. Mukri, M.Ag.
NIP. 195904161987031002


Dr. Luky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP. 197611042005011004

Ketua Jurusan Siyasah


Dr. Nurmazli, S.H., S.Ag., M.H.
NIP. 197111061998032005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan perlindungan Anak perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung)"**. Disusun oleh Nama: **Al Apid NPM: 1521020007**, Program Studi: **Siyasah Syar'iyah (Hukum Tata Negara)**.

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : **Dr. H. A.Khumaedi Ja'far, S.Ag.,M.Ag.**

Sekretaris : **Syeh Syarif Hidayatullah,M.H.I.**

Penguji Utama : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.**

Penguji Pendamping I: **Prof.Dr.H.Moh.Mukri, M.Ag.**

Penguji Pendamping II: **Dr. Iiky Faizal,S.Sos.,M.H**



**Dekan Fakultas Syariah
Raden Intan Lampung**

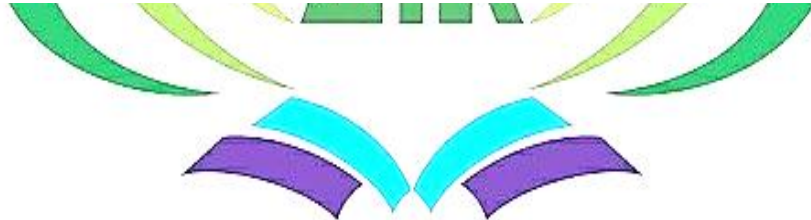
Dr. H. Muiruddin, M.H.I.
15210221993031002

MOTTO

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ
فَأَخْوَانُكُمْ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

Artinya : Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS.Al-Baqarah:220)"¹



¹ Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya. Al-Baqarah ayat 220* (Bandung : CV Penerbit di Ponogoro, 2015) hl 35 .

PERSEMBAHAN

Sujud syukur Ku persembahkan pada Allah Yang Maha Kuasa, terimakasih atas karunia dan kemudahan yang Engkau berikan, berkat rahmat dan detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi saya pada orang-orang tersayang :

1. Kedua orang tua saya ayahanda Alm. Armani dan ibunda Rumina tercinta yang tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, mendidik saya sejak dari kecil hingga dewasa seperti ini, terimakasih ku persembahkan atas jasa, perjuangan dan pengorbanan dalam hidup ini. serta senantiasa mendo'akan dan sangat mengharapkan keberhasilan saya. Dan berkat do'a restu keduanyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Untuk semua Kakak-kakakku terimakasih selalu memberiku motivasi dan Adik-adikku semoga gelar ini bisa menjadi motivasi untukmu supaya bisa terus melanjutkan pendidikannya dan meraih cita-cita setinggi-tingginya.
3. Miya Wulandari yang telah menemani, mengajari, memotivasi, memberikan semangat dan do'a dalam pembuatan skripsi ini, terimakasih untuk semuanya terimakasih telah sabar menungguku hingga study ku lulus. Semoga kita bisa bersama-sama sukses untuk masa depan yang cerah.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Bandar Lampung 29 Juli 1995. Dengan nama lengkap Al Aqid.Putra kelima dari delapan bersaudara dari pasangan Alm. Armani dan Rumina. Berikut riwayat pendidikan penulis :

1. Pendidikan dimulai dari pendidikan dasar di Sekolah Dasar SDN 5 Sukajawa Bandar Lampung pada tahun 2003 dan lulus pada tahun 2009.
2. Melanjutkan pendidikan menengah pertama di Mts. Nadhlatul Ulama Bandar Lampung selesai pada tahun 2012.
3. Melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 2 Bandar Lampung selesai pada tahun 2015.
4. Dan pada tahun 2015 melanjutkan pendidikan kejenjang pendidikan tinggi, di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Siyasaḥ Syari'ah.



KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT, penggendang diri dan seluruh ciptaan-Nya yang telah memberikan hidayah, taufik dan Rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad Saw, yang telah mewariskan dua sumber cahaya kebenaran dalam perjalanan manusia hingga akhir zaman yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Penulisan skripsi ini diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana dalam Ilmu Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Prof, Dr.H. Moh. Mukri, M.Ag dan sekaligus selaku Pembimbing I yang mengarahkan dan membimbing saya sehingga skripsi ini selesai.
2. Dr. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Dr. Nurnazli, SH, S.Ag, M.H.Selaku ketua Jurusan Siyasah, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
4. Frengki M.Si selaku Sekertaris jurusan Siyasah Syar'iyah Fakultas syariah.

6. Dr.Liky Faizal S.Sos, M.H. selaku Pembimbing II yang telah mengarahkan dan memberi motivasi penulisan skripsi ini hingga selesai.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan Ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
8. Rekan-Rekan Mahasiswa/i Fakultas Syariah khususnya jurusan Siyash Syar'iyah (Hukum Tata Negara) yang telah memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal itu tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan dana yang dimiliki. Untuk itu kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran- saran guna melengkapi tulisan ini.

Akhirnya dengan iringan terima kasih penulis memanjatkan do'a kehadiran Allah SWT, Semoga jerih payah dan amal baik bapak ibu serta teman- teman akan mendapatkan balasan dari Allah SWT dan semoga skripsi ini dapat bermamfaat bagi penulis pada khususnya dan para pembaca pada umumnya. Aamiin.

Bandar Lampung, 11 November 2019

Al Apid
1521020007

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	4
D. Fokus Penelitian.....	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	8
G. Signifikansi Penelitian	8
H. Metode Penelitian	9

BAB II KAJIAN TEORI

A. KajianTeori	15
1. Pengertian Penyelenggaraan PerlindunganAnak.....	15
2. Kekerasan terhadap Anak.....	23
3. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	33
4. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak	33
5. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i>	35
a. Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyasah</i>	49
b. Perlindungan Anak dalam Islam.....	42
B. Tinjauan Pustaka	49

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	51
B. Visi Misi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	54
C. Data kekerasan pada Anak di kota Bandar Lampung	55
D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	55
E. Pelaksanaan Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	56
F. Saran dan Prasarana	61
G. Gambaran Cakupan kegiatan atau wilayah pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung	62
H. Faktor-faktor penghambat dan pendorong Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kota Bandar Lampung	63
I. Data Responden	64
J. Data Wawancara dari Pihak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak	65

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah kota Bandar Lampung No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak	68
B. Faktor-aktor penghambat dan pendorong Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kota Bandar Lampung	71
C. Pandangan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak	72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Guna memperjelas perspektif pokok bahasan, maka perlu penjelasan judul skripsi dengan makna atau definisi yang terkandung didalamnya. Judul ini adalah **“Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif di Indonesia (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)”**. Adapun beberapa hal penting yang perlu dijelaskan sehubungan dengan judul tersebut adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Implementasi

Efektivitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu tugas untuk memantau atau suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.² Dan Implementasi yaitu suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.³

²*Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat*, (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 284.

³*pengertian-peran-definisi-fungsi-apa itu*” (On-line), tersedia di:
<http://www.artikelsiana.com/> (05 juli 2019)

2. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 adalah Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang membahas tentang penyelenggaraan perlindungan Anak.

3. Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, Masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak⁴.

4. Perspektif *Fiqh Siyasah*

Perspektif yaitu suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena⁵. Dan *Fiqh Siyasah* yaitu ilmu tata negara islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya⁶.

5. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan. Istilah ini juga

⁴Perda Kota Bandar Lampung No. 02 tahun 2016 Tentang *Penyeleggaraan Perlindungan Anak*

⁵pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang, (On-line), tersedia di: www.definisimenurutparaahli.com (05 juli 2019).

⁶. Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, h. 13.

mendeskripsikan penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok.⁷

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah proses Efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Perspektif *Fiqh Siyasah* dan hukum positif di Indonesia (Studi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan yang mendorong penulis memilih judul proposal tersebut adalah:

1. Alasan Objektif

Kajian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak perlu dibahas karena pelaksanaannya kurang terkendali dengan baik dan masih banyaknya Anak-Anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah yang membutuhkan perhatian khusus sesuai dengan yang di terapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Kajian meninjau pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam memberikan kualitas terbaik dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

⁷(On-line) tersedia di : https://id.wikipedia.org/wiki/Hukum_positif (11 november 2019)

2. Alasan Subjektif

Untuk menambah pengetahuan tentang Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan permasalahan yang berkaitan dengan jurusan Hukum Tatanegara (*Siyasah*) fakultas Syari'ah (UIN) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu dan memperdalam pengetahuan.

C. Latar Belakang Masalah

Setiap Anak secara kodrati memiliki harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun⁸. Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan dengan harta yang lainnya. Karena itu, Anak adalah amanah Tuhan yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri Anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.

Anak merupakan bagian dari warga negara dan generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dipenuhi kebutuhannya sampai mencapai taraf dewasa, karena letak kemajuan suatu negara terletak pada generasi penerusnya.⁹ Generasi penerus harus dibekali dengan pendidikan, pemenuhan kesehatan dan pemenuhan lainnya dalam hal tumbuh dan

⁸*Kekerasan terhadap anak di mata anak indonesia*” (On-line) ,tersedia di: <https://tirto.id/unicef-soroti-kekerasan-terhadap-anak-oleh-aparat-saat-demonstrasi-ei5F>. (05 juli 2019).

⁹Laurensius Arliman S, 2015, Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI, Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali, Jurnal Ilmu Hukum Selat, Volume: 3, Nomor: 1, Edisi: 5, h.341

berkembang seorang Anak. hak ini dijamin oleh konstitusional sebagai negara hukum .¹⁰

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia¹¹.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara umum dikatakan, “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹²”.

Dalam perkembangan Anak yang semakin dewasa terjadi berbagai macam fenomena negatif yang mengusik kehidupan mereka. Berbagai penyimpangan sosial yang ada dalam masyarakat ini semakin banyak terjadi dan sebagian besar menimpa Anak-Anak. Walaupun Undang-undang Perlindungan Anak telah diterbitkan. Para pelaku kekerasan, eksploitasi,

¹⁰Laurensius Arliman S, 2015, *Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)*, Bandung: Universitas Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum, Volume: 2, Nomor: 2, h. 371.

¹¹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h.1.

¹²Muhammad Taufiq Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka cipta), h.105.

kekerasan seksual, diskriminasi dan penelantaran Anak tetap saja berani melakukan aksinya.

Masa Anak-Anak merupakan masa yang sangat menentukan untuk terbentuknya kepribadian seseorang. Apabila Anak berkembang dengan baik maka itu merupakan harapan yang baik bagi suatu bangsa untuk lebih maju.

Agama Islam datang membawa rahmat bagi seluruh alam termasuk Anak-Anak. Islam menyatakan bahwa Anak-Anak merupakan makhluk yang perlu dikasihi dan dilindungi karena ketidakberdayaan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup dan melindungi dirinya sendiri. Perlindungan Anak dalam hukum Islam mengandung arti pemenuhan hak-hak Anak dan perlindungannya dari hal-hal yang dapat membahayakan dirinya¹³.

Al-Qur'an mengajarkan bahwa Anak harus dipelihara dengan baik yang karenanya dilarang membunuh Anak sendiri dalam keadaan apapun apalagi takut akan kemiskinan. Dalam surat Al- An'am ayat 151:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْهِمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ
إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي
حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكَُمْ وَصَّامُ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (١ ٥ ١)

Artinya: "Katakanlah "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kalian oleh Tuhan kalian; yaitu: Janganlah kalian mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kalian membunuh Anak-Anak kalian karena takut kemiskinan Kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang

¹³Pendidikan Agama islam (On-line), tersedia di : <https://zenodo.org/record/1161556> / (08 Mei 2019)

tampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhan kalian kepada kalian supaya kalian memahaminya).” (QS. Al-An’am : 151)¹⁴

Dari beberapa uraian diatas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah proses efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak).

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam skripsi ini terfokus pada Efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan melihat pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap Efektifitas Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No 02 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sudah Efektif?
2. Apa faktor pendorong dan penghambat penyelenggaraan perlindungan Anak di kota Bandar Lampung?

¹⁴Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya. Al-An'am : ayat 151*(Bandung :CV Penerbit di Ponogoro, 2015), h. 148.

3. Bagaimana pandangan *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak di kota Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat penyelenggaraan perlindungan Anak di kota Bandar Lampung
3. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif di Indonesia terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

G. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai Strategi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca mengenai efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Secara praktis Untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk menyelesaikan masalah-masalah yang muncul dengan lebih kritis dan untuk memenuhi syarat wajib bagi setiap mahasiswa dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Sebelum dikemukakan metode penelitian yang akan digunakan dalam skripsi ini, maka akan didefinisikan metode penelitian. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu teknis dalam menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan, sedangkan penelitian merupakan upaya dalam bidang pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta secara sistematis untuk mewujudkan kebenaran.¹⁵

Metode penelitian adalah cara berfikir dan berbuat yang dipersiapkan secara baik untuk mengadakan penelitian dan untuk mencapai tujuan yang baik.¹⁶ Berdasarkan keterangan tersebut maka jelas yang dimaksud dengan metode penelitian yaitu suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang cara-cara yang digunakan dalam mengadakan penelitian yang berfungsi sebagai acuan atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melakukan suatu perintah ilmiah sumber data.

Untuk mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu menghantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik. Adapun data yang digunakan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

¹⁵Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*,(Jakarta:Bumi Aksara,2004), Cet. Ke-VII, h.24.

¹⁶Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Mandae Maju, 1996),Cet. Ket-VII, h.15 .

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam Penelitian Lapangan (*field research*). yaitu penelitian dilakukan pada objek Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung. Peneliti dapat langsung menemui *staff* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu Staff Bidang Pengawasan Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi kepada pihak yang bersangkutan.

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif-analisis, penelitian ini dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh kesimpulan.¹⁷

2. Sumber Data

Sumber data adalah dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah bahan utama dalam penelitian atau data yang dikumpulkan diolah sendiri dari organisasi yang diterbitkan atau menggunakannya. Pada umumnya data primer dianggap lebih baik dari pada data sekunder. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu data primer lebih bersifat terperinci dari pada data sekunder. Dalam hal ini data primer diperoleh dari lapangan atau di lokasi penelitian,

¹⁷Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h 126

penelitian ini dilakukan di Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumberdaya asli. Data sekunder dalam hal ini merupakan sumber data sebagai pelengkap.¹⁸ Pengumpulan data sekunder dengan cara mengadakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur yang menunjang peraturan perundang-undangan, serta bahan-bahan lain yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan merupakan teknik yang paling penting dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mengumpulkan data.¹⁹ Metode pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, oleh karena itu tahap pengumpulan data tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif, beberapa metode pengumpulan data:

- a. Metode Wawancara metode wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan

¹⁸Muhammad Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), h. 115.

¹⁹Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis, Cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 402.

berdasarkan masalah, tujuan dan hipotesis penelitian.²⁰ Dalam penelitian ini dilakukan wawancara terhadap sekretaris dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan Anak, dan kepala bidang data informasi bidang gender dan Anak.

b. Metode Observasi

Merupakan suatu kegiatan mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menyajikan gambaran riil suatu peristiwa atau untuk menjawab pertanyaan si peneliti. Observasi ini dilakukan di Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah kumpulan data yang berbentuk variabel tulisan, atau mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan penelitian.²¹

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, objek atau nilai

²⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), h. 54.

²¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Pt. Renika Cipta, 2014), h. 247.

yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, perusahaan, lembaga, media dan sebagainya.²² Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen atau anggota dari seluruh wilayah yang menjadi sasaran penelitian.²³ Dalam skripsi ini populasinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung yaitu sekretaris, kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan Anak, dan kepala bidang data informasi bidang gender dan Anak beserta *staff* berjumlah 25 orang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian.²⁴ Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.²⁵ *Purposif sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang dipilih oleh peneliti adalah sebanyak 3 orang yaitu, sekretaris, kepala bidang pemenuhan hak dan perlindungan Anak, dan kepala bidang data informasi bidang gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

²²Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015), h. 81.

²³Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 147.

²⁴Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 191), h. 102.

²⁵*Ibid*, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* h. 155.

5. Metode Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir induktif. Metode induktif adalah cara berfikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif di Indonesia

1. Pengertian Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.²⁶

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat kehidupan, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan secara optimal serta mendapat perlindungan dari ketelantaran, kekerasan dan diskriminasi.²⁷

Di Indonesia, telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM yang mencantumkan hak, pelaksanaan kewajiban dan tanggungjawab tersebut. Namun demikian, dalam kegiatan perlindungan Anak dan segala aspeknya ternyata memerlukan payung hukum untuk mewujudkan kehidupan terbaik untuk Anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia berdasarkan *Al-Qur'an* dan

²⁶Peraturan daerah No. 2 tahun 2016 kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan Anak, pasal 1 ayat (17)

²⁷*Ibid*

Hadits. Anak dalam hal generasi penerus bangsa dan negara mempunyai peran yang sangat penting. Didalam implementasinya, Anak merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan suatu bangsa, penentu masa depan dan penerus generasi.²⁸

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kelangsungan kehidupan manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Semua Anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus perjuangan bangsa dan diharapkan kelak mampu memikul tanggung jawab, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia. Sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perlindungan Anak juga ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.²⁹

²⁸Eny Kusdarini: Perlindungan Anak di Indonesia sebagai perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah, dalam jurnal Civics Volume 2,Nomor 1. Juli 2015

²⁹Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu Pasal 28 D ayat (1)

Kegiatan perlindungan Anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan Anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan Anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan Anak.³⁰

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, meliputi:

a. Perlindungan di bidang Agama

- 1) perlindungan untuk beribadah menurut agamanya.
- 2) Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya dijamin oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, wali, dan lembaga sosial. Perlindungan Anak dalam memeluk agamanya meliputi pembinaan, dan pengamalan ajaran agama bagi Anak.³¹

b. Perlindungan di bidang Kesehatan

- 1) Pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi Anak.
- 2) Orang tua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan Anak jika tidak mampu melaksanakan tanggung jawab, maka pemerintah wajib memenuhinya.

19. ³⁰Gosita, Arif, , *Masalah Perlindungan Anak*, , (Jakarta:Akademika Presindo, 1989), h.

³¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak Pasal 5

- 3) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar Anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup atau menimbulkan kecacatan.
- 4) Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi Anak dari upaya transplantasi organ tubuhnya untuk pihak lain. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib melindungi Anak dari perbuatan:
 - a) Pengambilan organ tubuh Anak atau jaringan tubuh Anak tanpa memperhatikan kesehatan Anak.
 - b) Jual beli organ atau jaringan tubuh Anak, dan
 - c) Penelitian kesehatan yang menggunakan Anak sebagai objek penelitian tanpa seizin orang tua dan tidak mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi Anak.
- c. perlindungan di bidang Pendidikan
 - 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak.
 - 2) Anak yang menyandang cacat fisik dan mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa.
 - 3) Anak yang memiliki keunggulan diberikan kesempatan dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan khusus.
 - 4) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan atau bantuan cuma-cuma atau pelayanan khusus

bagi Anak dari keluarga kurang mampu, Anak terlantar, dan Anak yang bertempat tinggal di Daerah Kota Bandar Lampung terpencil.

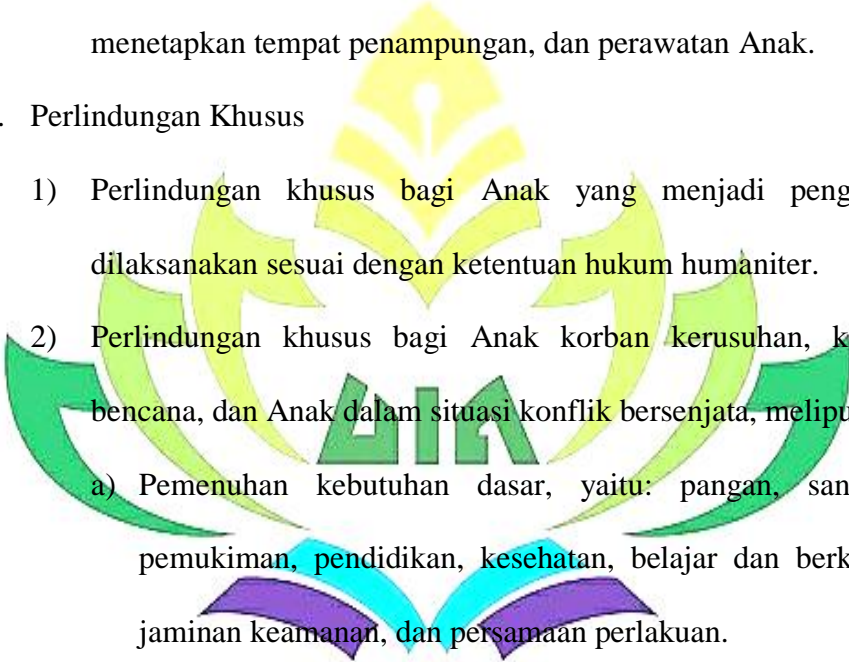
- 5) Anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib di lindungi dari tindak kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya.

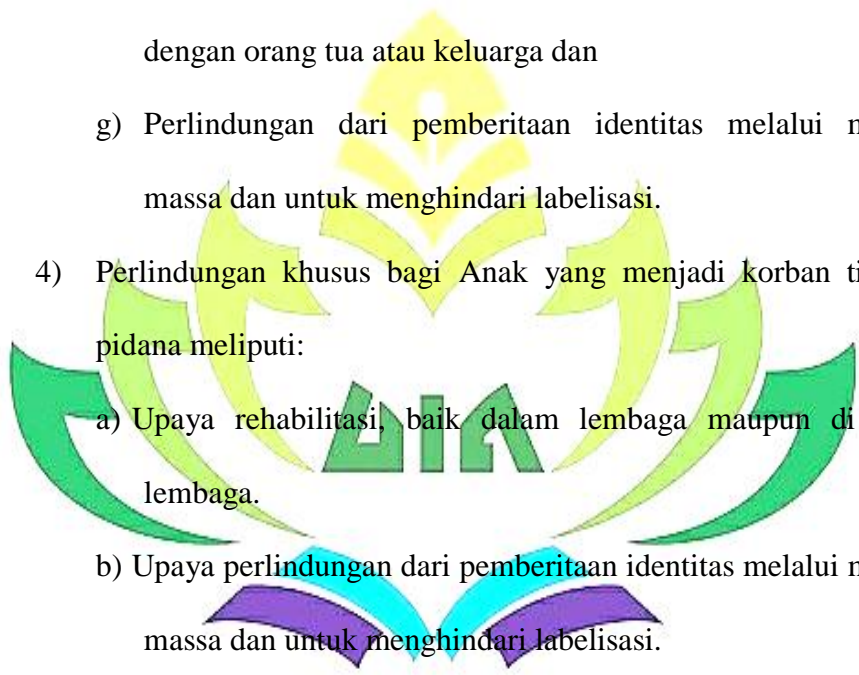
d. Perlindungan di bidang Sosial

- 1) Pemerintah wajib menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan Anak terlantar dalam hal penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan pengawasannya dilakukan oleh Menteri Sosial.

- 2) Pemerintah dalam menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan wajib mengupayakan dan membantu Anak, agar Anak dapat:

- a) Berpartisipasi.
- b) Bebas menyatakan pendapat dan berpikir sesuai dengan hati nurani dan agamanya.
- c) Bebas menerima informasi lisan atau tertulis sesuai dengan tahapan usia dan perkembangan Anak.
- d) Bebas berserikat dan berkumpul.
- e) Bebas beristirahat, bermain,, berekreasi, berkreasi dan berkarya seni budaya dan

- f) Memperoleh sarana bermain yang memnuhi syarat kesehatan dan keselamatan.
- 3) Anak terlantar karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya, maka lembaga, keluarga, atau pejabat yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan Anak sebagai Anak terlantar.
- 4) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud sekaligus menetapkan tempat penampungan, dan perawatan Anak.
- e. Perlindungan Khusus
- 1) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi pengungsi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum humaniter.
- 2) Perlindungan khusus bagi Anak korban kerusuhan, korban bencana, dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, meliputi:
- a) Pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu: pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan berkreasi, jaminan keamanan, dan persamaan perlakuan.
- b) Pemenuhan kebutuhan khusus bagi Anak yang menyandang cacat dan Anak yang mengalami gangguan psikososial.
- 3) Perlindungan khusus bagi Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak korban tindak pidana, meliputi:
- a) Perlakuan atau Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak Anak.
- 

- b) Penyediaan petugas pendamping khusus Anak sejak dini.
 - c) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
 - d) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik untuk Anak.
 - e) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - f) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga dan
 - g) Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
- 4) Perlindungan khusus bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana meliputi:
- a) Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga.
 - b) Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 - c) Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial dan
 - d) Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.
- 5) Perlindungan khusus bagi Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi dilakukan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk dapat menikmati budayanya sendiri, mengakui dan
- 

melaksanakan ajaran agamanya sendiri, dan menggunakan bahasanya sendiri.

6) Perlindungan khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, meliputi:

a) Peyebarluasan atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual.

b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, dan

c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap Anak secara ekonomi atau seksual.

7) Perlindungan hukum bagi Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), dan terlibat dalam produksi dan distribusinya, dilakukan melalui upaya pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

8) Perlindungan khusus bagi Anak korban penculikan, penjualan dan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung mengenai Anak dilakukan melalui upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, pengawasan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

9) Perlindungan khusus bagi Anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya:

- a) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi Anak korban tindak kekerasan dan pemantuan pelaporan, dan pemberian sanksi.

10) Perlindungan khusus bagi Anak penyandang cacat dilakukan melalui upaya:

- a) Perlakuan Anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak Anak.
- b) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan khusus, dan
- c) Memperoleh perlakuan yang sama dengan Anak lainnya untuk mencapai integrasi sosial penuh mungkin dan pengembangan individu.

11) Perlindungan khusus bagi Anak korban perlakuan salah dan penelantaran dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

2. Kekerasan Terhadap Anak

a. Pengertian Kekerasan

Secara teoritis, kekerasan terhadap Anak (*child abuse*) dapat didefinisikan sebagai peristiwa pelukaan fisik, mental atau seksual

yang umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan Anak yang mana itu semua diindikasikan dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan Anak.³²

Kekerasan langsung adalah sebuah peristiwa (*event*); kekerasan struktural adalah sebuah proses; sedangkan kekerasan kultural adalah sesuatu yang bersifat permanen. Ketiga tipologi kekerasan ini memasuki waktu secara berbeda, yang analog dengan perbedaan dalam teori gempa bumi antara gempa bumi sebagai suatu peristiwa (kekerasan langsung), gerakan-gerakan lempeng tektonik sebagai sebuah proses (kekerasan struktural), dan garisgaris retakan sebagai suatu kondisi yang permanen (kekerasan kultural).³³

Menurut sifatnya kekerasan ada 2 (dua) yaitu kekerasan personal dan kekerasan struktural. Kekerasan personal bersifat dinamis, mudah diamati, memperlihatkan fluktuasi yang hebat yang dapat menimbulkan perubahan sedangkan kekerasan struktural sifatnya statis, memperlihatkan stabilitas tertentu dan tidak tampak. Kekerasan struktural mengambil bentuk-bentuk seperti eksploitasi, fragmentasi masyarakat, rusaknya solidaritas, penetrasi kekuatan luar yang menghilangkan otonomi masyarakat, dan marginalisasi masyarakat sehingga meniadakan partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan tentang nasib mereka sendiri. Kekerasan

³²Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana, 2013), h.28.

³³Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekeraan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta : Cahaya Abadi. 2015), h. 6.

struktural ini juga menimbulkan kemiskinan, ketidakmerataan pendapatan dan kekayaan, ketidakadilan sosial, dan alienasi atau peniadaan individual karena proses penyeragaman warga negara.³⁴

b. Kekerasan terhadap Anak

1. Pengertian Kekerasan terhadap Anak

Kekerasan terhadap Anak dikenal istilah *abuse*. *Abuse* adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah biasanya dilakukan para orang tua atau pihak lain yang seharusnya merawat Anak. Kekerasan terhadap Anak-Anak (*child abuse*) berkisar dari pengabaian Anak sampai kepada pemerkosaan dan pembunuhan.³⁵ Terry E. Lawson, psikiater Anak yang dikutip Rakhmat dalam Baihaqi, mengklasifikasikan kekerasan terhadap Anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk, yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse*, dan *sexual abuse*. Sementara Suharto mengelompokkan *child abuse* menjadi *physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual), dan *social abuse* (kekerasan secara sosial).

³⁴*Ibid*, Ismantoro Dwi Yuwono, h. 3.

³⁵Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” (Online) tersedia di: <https://www.kemenpppa.go.id/>, (5 Juli 2019)

Keempat bentuk *child abuse* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:³⁶

- a. Kekerasan Anak secara fisik, adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap Anak dengan atau tanpa menggunakan benda -benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada Anak. Bentuk luka dapat berupa lecet, atau memar akibat persentuhan atau kekerasan benda tumpul, seperti bekas gigitan, cubitan, ikat pinggang atau rotan.
- b. Kekerasan Anak secara psikis, meliputi penghardikan, penyampaian kata-kata kasar dan kotor, memperlihatkan buku gambar, dan film pornografi pada Anak. Anak yang mendapatkan perlakuan ini umumnya menunjukkan gejala perilaku *maladaftif*, seperti menarik diri, pemalu, menangis jika didekati, takut ke luar rumah dan takut bertemu dengan orang lain.
- c. Kekerasan Anak secara seksual, dapat berupa perlakuan prakontrak seksual antara Anak dengan orang yang lebih besar (melalui kata, sentuhan, gambar visual), maupun perlakuan kontrak seksual secara langsung antara Anak dengan orang dewasa (*incest*, perkosaan, eksploitasi seksual).

³⁶kekerasan terhadap anak “(On-line), tersedia di: <https://dik.my.id/kekerasan-pada-anak/> (09 juli 2019).

d. Kekerasan secara sosial, dapat mencakup penelantaran Anak dan eksploitasi Anak. Penelantaran Anak adalah sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian layak terhadap proses tumbuh kembang Anak. Misalnya, Anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi Anak menunjukkan pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap Anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa Anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial atau politik tanpa memperhatikan hak-hak Anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya. Misalnya Anak dipaksa untuk bekerja demi kepentingan ekonomi yang harus terpenuhi.³⁷

Pembuatan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 di atas dilatarbelakangi oleh peraktifikasian Konvensi Hak Anak oleh Indonesia pada tahun 1990 setelah konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum PBB guna mengatur masalah hak dan kebutuhan khusus Anak-Anak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih

³⁷Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” (Online) tersedia di: <https://www.kemenpppa.go.id/>, (5 Juli 2019)

dalam kandungan. Pasal ini mempunyai cakupan yang sangat luas karena Anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

2. Faktor dan Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Terjadinya kekerasan terhadap Anak disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya begitu kompleks, seperti yang dijelaskan oleh Suharto, kekerasan terhadap Anak umumnya disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari Anak sendiri maupun eksternal yang berasal dari keluarga dan masyarakat seperti :

- a. Anak mengalami cacat tubuh, gangguan tingkah laku, autisme, ketidaktahuan Anak akan hak-haknya, Anak terlalu tergantung kepada orang dewasa.³⁸
- b. Kemiskinan keluarga, orang tua menganggur, penghasilan tidak cukup, banyak Anak.
- c. Keluarga tunggal atau keluarga pecah (*Broken Home*). Keluarga yang belum matang secara psikologis, ketidaktahuan mendidik Anak, harapan orang tua yang tidak realistis, Anak yang tidak diinginkan, Anak lahir di luar nikah.

³⁸ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Pressindo, (Jakarta: Prenamedia. 2011),h.12.

- d. Penyakit parah atau gangguan mental pada salah satu atau kedua orang tua. Gangguan mental pada orang tua bisa juga memegang peran penyebab timbulnya penganiayaan atau penelantaran Anak karena pola berfikir atau keputusan-keputusan orang tua menjadi terganggu.³⁹
- e. Sejarah penelantaran Anak. Orang tua yang semasa kecilnya mengalami perlakuan salah cenderung memperlakukan salah Anak-Anaknya.
- f. Kondisi lingkungan sosial yang buruk, permukiman kumuh, tergusurnya tempat bermain Anak, sikap acuh tak acuh terhadap tindakan eksploitasi, pandangan terhadap nilai Anak yang terlalu rendah.⁴⁰

Selain faktor yang di atas, harus diakui selama ini masih ada budaya dalam masyarakat yang kurang menguntungkan terhadap Anak. Meski belum ada rincian budaya mana saja yang merugikan Anak, tetapi sejumlah studi telah membuktikan bahwa di sekitar kita masih banyak dijumpai praktek-praktek budaya yang merugikan Anak baik yang merugikan secara fisik maupun emosional. Misalnya, dalam praktek pengasuhan Anak yang menekankan kepatuhan kepada orangtua. Dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai kepatuhan masyarakat membiarkan dan mentolerir hukuman fisik, perkataan kasar,

³⁹Tina Asmarawati, *Hukum dan Psikiatri*, Yoyakarta: Depublish, 2013 h.109.

⁴⁰*Ibid*,h.7.

makian, maupun yang berbentuk pengisolasian sosial Anak. Sementara itu, menurut Yesmil menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap Anak dibagi kedalam tiga faktor:

1. Faktor orang tua atau keluarga:

- a. Praktik-praktik budaya yang merugikan Anak,
- b. Dibesarkan dengan penganiayaan,
- c. Gangguan mental,
- d. Belum mencapai kematangan fisik, emosi maupun sosial
- e. Pecandu minuman keras dan obat.

2. Faktor lingkungan sosial dan lingkungan

Kondisi sosial juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap Anak. Lingkungan adalah berbagai faktor dan kondisi yang melingkupi dan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan serta kehidupan seorang Anak⁴¹

Faktor lingkungan yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap Anak antara lain:

- a. Kemiskinan dalam masyarakat dan tekanan nilai materialistis,
- b. Kondisi sosial ekonomi yang rendah,

⁴¹Yesmil Anwar dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana* ,Jakarta. Grasindo .2008 .h..212.

- c. Adanya anggapan orang tua bahwa Anak adalah milik orang tua sendiri,
- d. Status wanita yang dianggap rendah,
- e. Nilai masyarakat yang terlalu individualistik.
- f. Faktor Anak itu sendiri

Faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dan penelantaran terhadap Anak dari Anak itu sendiri antara lain:

- a) Penderita gangguan perkembang, menerita penyebab penyakit kronis disebabkan ketergantungan Anak kepada lingkungannya.
- b) Perilaku menyimpang pada Anak.

3. Bentuk bentuk kekerasan terhadap Anak

- a. Kekerasan pada fisik bentuk kekerasan dari segi ini bisa berupa pemukulan, penganiayaan ringan hingga berat sehingga Anak bisa mengalami lebam, atau luka-luka di sekujur tubuhnya. Bentuk kekerasan ini mudah sekali dilihat. Bahkan, bisa dijadikan bahan bukti untuk melaporkan pelaku kekerasan.
- b. Kekerasan secara psikis bentuk ini bisa berupa anacaman, pelecehan atau sikap tidak mengenakan yang menyebabkan Anak menjadi pendiam, penakut, depresi, suka histeris, bahkan lambat laut bisa menjadi gila. Bentuk ini memang tidak bisa dilihat secara langsung.

Namun, perlu kepekaan atau pendekatan yang lebih agar Anak bisa bercerita dengan tenang.

- c. Kekerasan ekonomi bentuk ini memang tidak lepas di sekitar lingkungan kita, bahkan hampir di seluruh Indonesia. Bentuk ini berupa melantarkan Anak atau tidak mampu memenuhi kebutuhan Anak. Dengan demikian, maka akan memicu kekerasan di lingkungan keluarga. Kekerasan pada fisik pun akan terjadi.
- d. Kekerasan seksual bentuk ini bahkan motif paling banyak dalam kekerasan. Ini bisa berupa pencabulan dan pemerkosaan. Jika sudah demikian, maka akan muncul kekerasan-kekerasan lain yang berupa pengancaman, penganiayaan, dan pembunuhan.
- e. Eksploitasi Anak eksploitasi Anak merupakan bentuk kekerasan terhadap Anak juga. Karena dalam hal ini, Anak dipaksa bekerja. Padahal, dalam usia Anak sebaiknya memperoleh salah satu haknya sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 yaitu, “Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka mengembangkan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”
- f. Eksploitasi seksual bentuk ini paling mengerikan dari bentuk kekerasan lainnya. Karena dalam bentuk ini, Anak

akan dijadikan pemuas nafsu bagi yang membutuhkannya. Mengucapkannya saja mengerikan, apalagi jika Anak mengalaminya sendiri.

- g. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang Anak bentuk kekerasan ini juga ramai di media-media. Karena tidak segan-segan, bentuk ini sudah membentuk jaringan yang menyebar luas. Anak diperjual belikan seperti barang yang mudah didapatkan di mana-mana.

3. Tujuan Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Penyelenggaraan perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak secara sistematis, terintegrasi, atas perlindungan dari kekerasan, dan penelantaran.⁴²

Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya Anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.⁴³

4. Ruang Lingkup Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Ruang lingkup penyelenggaraan perlindungan Anak meliputi:

- a. pencegahan;

⁴²Peraturan daerah No. 2 tahun 2016 kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan Anak, pasal 3

⁴³Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 3

Pencegahan adalah upaya pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran terhadap Anak.

Bentuk pencegahan yang dilakukan adalah peningkatan pengawasan dan penjagaan agar Anak tidak memperoleh kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran oleh orang di lingkungan sekitarnya baik di sekolah maupun dilingkungannya.

b. pengurangan resiko

Tindakan dini terhadap Anak dan keluarganya yang berada dalam situasi rentan atau beresiko mengalami berbagai tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

c. Penanganan

Tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi dan reintegrasi terhadap Anak yang menjadi korban tindak kekerasn, perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran.

d. pemulangan dan reintegrasi sosial.

Pemulangan adalah upayah mengembalikan perempuan dan Anak korban kekerasan dari luar negri ketitik debarkasih/*entrypoint* atau Daerah Kota Bandar Lampung penerima keDaerah Kota Bandar Lampung asal

Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali saksi dan atau korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi saksi atau korban .

5. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh* merupakan *tarqib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: Ilmu tentang hukum-hukum *syara* yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci⁴⁴.

Adapun *Al-siyasah* berasal dari kata yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan. Secara terminologis, sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, *Siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara*.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan

⁴⁴Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), h. 18.

atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalannya⁴⁵.

Objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan⁴⁶. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan demikian terlihat dari penjelasan T.M. Hasbi Ash Shiddieqy: “Objek kajian *siyasah* adalah pekerjaan-pekerjaan *mukallaf* dan urusan-urusan mereka dari jurusan *penadbiran*-nya, dengan mengingat persesuaian *penadbiran* itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan *syariah ‘amah* yang tetap”⁴⁷.

Suyuti Pulungan, menampilkan beberapa pendapat ulama tentang obyek kajian *fiqh siyasah* yang berbeda-beda, lalu menyimpulkan bahwa objek kajiannya adalah :

⁴⁵*Ibid*, h.30.

⁴⁶*Ibid*. h. 33.

⁴⁷Wahbah al-Zuhayli. *Ushul al-Fiqh al-islami*, (Damaskus: Daral-Fikr, 2010), h. 25.

- a. Peraturan dan perundang-undangan negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan umat.
- b. Pengorganisasian dan pengaturan kemaslahatan.
- c. Mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam usaha mencapai tujuan negara⁴⁸.

Metode yang digunakan dalam membahas *fiqh siyasah* tidak berbeda dengan metode yang digunakan dalam membahas *fiqh*lain, dalam *fiqh siyasah* juga menggunakan ilmu *ushul fiqh* dan *qowaid fiqh*. Dibandingkan dengan fiqh-fiqh yang disebutkan, penggunaan metode ini dalam *fiqh siyasah* terasa lebih penting. Alasannya, masalah *siyasah* tidak diatur secara terperinci oleh syari'at Al-Qur'an dan Al-Hadits⁴⁹. Secara umum, dalam *fiqh siyasah*, digunakan metode-metode seperti:

1. *Al-Qiyas*

■ *Al-Qiyas* dalam *fiqh siyasah*, digunakan untuk mencari ilat hukum. Dengan penggunaan *Al-Qiyas*, hukum dari sesuatu masalah, dapat diterapkan pada masalah yang lain pada masa dan tempat yang berbeda, jika masalah-masalah yang disebutkan terakhir mempunyai ilat hukum yang sama dengan masalah yang disebutkan pertama.

Penggunaan *al-Qiyas* sangat bermanfaat, terutama dalam memecahkan masalah-masalah baru. Akan tetapi kenyataanya,

⁴⁸*Ibid.* h. 48.

⁴⁹H. A. Djazuli. *Fiqh Siyâsah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 30.

tidak semua masalah baru dapat dipecahkan dengan penggunaan *Al-Qiyas*. Dalam keadaan demikian, digunakan metode lainnya⁵⁰.

2. *Al-Mashalahah al-Mursalah*.

Pada umumnya *Al-Mashalahah al-Mursalah* digunakan dan mengendalikan persoalan-persoalan yang tidak diatur oleh syari'at Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oleh karena itu, penarapan *al-Mashlahah al-Mursalaah* harus didasarkan pada hasil penelitian yang cermat dan akurat juga dalam kepustakaan fiqh, dikenal dengan istilah *istqra'*. Tanpa penelitian seperti itu, penggunaan *al-Mashlahah al-Mursalah* tidak akan menimbulkan kemaslahatan, tetapi justru sebaliknya mengakibatkan kemafsadatan⁵¹.

3. *Sadd al-Dzariah dan Fath al-Dzari'ah*

Dalam *fiqh siyasah sad al-Dzariah* digunakan sebagai upaya pengendalian masyarakat untuk menghindari kemafsadzataan. Dan *Fath al-Dzari'ah* digunakan sebagai upaya perekayasaan masyarakat untuk mencapai kemaslahatan⁵².

4. *Al-'Adah*

Metode ketiga yang banyak digunakan dalam *fiqh siyasah* adalah *al-'adah*. *Adah* ini ada dua macam, yaitu: *al-adah ash shohihah* dan *al-'addah al-fasidah*. *Al-'adah ash sohihah* yaitu

⁵⁰Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 50.

⁵¹*Ibid.*

⁵²Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 51.

adat yang tidak menyalahi *Syara'*, sedangkan *al-'adah al-fasida* yaitu adat yang bertentangan dengan syara'⁵³.

5. *Al-Istihsan*

Sering diartikan perubahan dalil yang dipakai seorang mujtahid. Dalam hubunga itu dalil yang satu ke dalil yang lain yang menurutnya lebih kuat. Menurut 'Ibn 'Arabiyy: "melaksAnakan dalil yang kuat diantara dua dalil"⁵⁴.

6. Kaidah-kaidah *Kulliyah Fiqhiyah*.

Kaidah ini sebagai teori ulama banyak digunakan untuk melihat ketepatan pelaksanaan *fiqh siyasah*. Kaidah-kaidah ini bersifat umum. Oleh karena itu dalam penggunaannya perlu memperhatikan kekecualian-kekecualian dan syarat-syarat tertentu⁵⁵.

a. **Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah***

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup *fiqh siyâsah* menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:


1. *Siyâsah Dustûriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan);
2. *Siyâsah Tasyrî'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan tetang penetapan hukum);

⁵³*Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵Abdul Muin Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 70.

3. *Siyâsah Qadlâ'iyah Syar'iyah* (kebijaksanaan peradilan);
4. *Siyâsah Mâliyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter);
5. *Siyâsah 'Idâriyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan administrasi negara);
6. *Siyâsah Dauliyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional);
7. *Siyâsah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang);
8. *Siyâsah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan)⁵⁶.



Sehingga dalam pembahasan skripsi ini *Fiqh Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* yang akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini. *Fiqh Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* yaitu, keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau undang-undang bagi kemaslahatan umat⁵⁷.


Oleh karena itu objek kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* meliputi peraturan perundang-undangan yang bersumber dari al-quran, hadist nabi, kebijakan pemimpin, ijtihad ulama, dan adat kebiasaan suatu negara baik tertulis ataupun tidak tertulis yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan

⁵⁶Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2017), h. 35

⁵⁷Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 60.

dengan prinsip-prinsip agama yang merupakan perwujudan realisasi kemaslahatan rakyat demi memenuhi kebutuhannya⁵⁸.

Ilmu *Siyāsah Dusturiyāh Syar'iyah* mulai mendapat sorotan dan minat dari masyarakat yang ingin mengetahui calon pemimpin seperti apa yang diinginkan dalam Alquran. Banyak calon pemimpin Islam sering menjelaskan bahwa mereka ingin menjalankan amanah menurut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi yang terjadi malah sebaliknya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman seorang calon pemimpin tentang apa yang dijelaskan Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sistem pemerintahan dalam Alquran⁵⁹.



Fiqh Siyasah Dusturiyah Syar'iyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Keseluruhan persoalan tersebut, dan persoalan *Fiqh Siyasah Dusturiyah Syar'iyah* umumnya tidak lepas dari dua hal pokok: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Quran maupun hadis⁶⁰. Antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perintah agar berlaku adil dan menetapkan hukum adalah QS.An-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ

⁵⁸ *Ibid.* h. 62.

⁵⁹ Saebani Beni. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. (Bandung: Pustaka Setia. 2013), h. 21.

⁶⁰ *Ibid.* h. 23.

تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا
(٥٨)

Artinya :*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat*⁶¹.

Maksud dari ayat di atas adalah sifat adil penguasa terhadap rakyat di bidang apapun dengan tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain di dalam pelaksanaan hukum, sekalipun terhadap keluarga bahkan Anak sendiri⁶².

b. Perlindungan Anak dalam Islam



Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orangtua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orangtua agar dapat melihat Anak-Anaknya tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya.⁶³Berkaitan dengan eksistensi Anak, Al-Qur'an menyebutkan dengan beberapa istilah antara lain yaitu perhiasan atau kesenangan firman Allah SWT QS Al-Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا
وَحَيْرٌ أَمَلًا

⁶¹Departemen Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. An-nissa: 58.(Bandung :CV Penerbit di Ponogoro, 2015),h.87.

⁶²Abdul Salim Munir. *Fiqh Siyasah Konsepsi Politik dalam AL-Quran*. (Yogyakarta: Raja Grafindo. 2016), h. 80.

⁶³(On-line), tersedia di: <http://tarbiyahtulizzatiljannah.wordpress.com/2013/01/28/anak-dalam-pandangan- Islam/amp/> (15 Juli 2019)

Artinya : Harta dan Anak-Anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.(QS.Al-Kahfi:46)⁶⁴

Perhatian Islam terhadap Anak-Anak telah berlangsung sejak lebih dari seribu empat ratus tahun yang lalu. Islam selalu merayakan dan menaruh perhatian pada Anak-Anak tidak hanya setelah dilahirkan tetapi juga sebelumnya. Anak adalah amanah yang senantiasa harus dijaga dan dirawat sebagaimana yang difirman Allah QS.Al-Baqarah ayat 220:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya : Tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.(QS.Al-Baqarah:220)⁶⁵

Islam secara khusus telah menggarisbawahi hak-hak Anak-Anak.⁶⁶ Ternyata cukup banyak ayat-ayat Al-Quran dan Hadits Nabi yang membicarakan mengenai hak-hak yang harus diperoleh Anak ini, antara lain :

⁶⁴Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya. Al-kahfi :ayat 46* (Bandung :CV Penerbit di Ponogoro, 2015),h.301.

⁶⁵Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya. Al-Baqarah ayat 220* (Bandung :CV Penerbit di Ponogoro, 2015), h. 35 .

⁶⁶Dewan Ulama Al-Azhar, *Ajaran Islam tentang Perawatan Islam* (Bandung : al-Bayan, 1985), h. 15.

1. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Ada sejumlah aturan-aturan umum dan prinsip-prinsip dasar sebagai pedoman, dimana Islam mengajarkan bahwa menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh berkembangnya Anak itu merupakan keharusan, sedangkan meremehkan atau mengendorkan pelaksanaan prinsip-prinsip dasar tersebut dianggap sebagai suatu dosa besar.

2. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka.

Meskipun Allah telah melengkapi manusia dengan kecenderungan alamiyah untuk menghindar dari bahaya yang mengancamnya ternyata Allah masih juga secara tegas mengingatkan kepada setiap orangtua untuk terus menerus melindungi dan menjaga diri dan keluarganya, khususnya Anak-Anak dan istrinya, dari siksa api neraka.⁶⁷ Tercantum dalam QS.

At- Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang

⁶⁷ tersedia di

*diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.(QS.At-Tahrim:6)*⁶⁸

Jadi, ayat di atas mengajarkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka, yaitu siksaan Allah yang akan ditimpakan di neraka kepada orang-orang yang berbuat dosa di dunia. Jadi, yang dimaksud dengan menjaga dalam ayat tadi ialah dengan selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah serta tidak mengerjakan perbuatan yang dilarangnya.

3. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok. Maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkannya. Para ahli fiqh, umumnya membagi orang-orang berhak menerima nafkah dari seseorang itu dalam 4 macam, yaitu : pertama, nafkah *ushul* yaitu bapak, kakek, terus keatas, kedua, nafkah *furu'* yaitu Anak, cucu, terus kebawah, ketiga, nafkah kerabat yaitu adik, kakak, terus menyamping, dan keempat, nafkah istri.

Adapun yang menjadi dasar perintah memberikan nafkah ini, antara lain adalah QS Al-Baqarah : 233

⁶⁸Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya. At- Tahrim :ayat 6*(Bandung :CV Penerbit di Ponogoro, 2015) h.560 .

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ ۚ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا
 تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا
 فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْتَرْضِعُوا
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : Para ibu hendaklah menyusukan Anak-Anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena Anaknyanya dan seorang ayah karena Anaknyanya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin Anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS.Al-Baqarah:233)⁶⁹

4. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Bila *Qs. Al-Tahrim* : 6 mengingatkan agar orangtua menjaga dan melindungi Anak-Anaknya dari siksa api neraka, ini berarti ia diwajibkan untuk melakukan pendidikan dan pengajaran terhadap Anak-Anaknya dengan sebaik-baiknya. Sebab sebagaimana Anak akan terhindar dari siksa api neraka bila ia tidak tahu tentang perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa? Bagaimana Anak bisa tahu tentang perbuatan dosa bila ia tidak diberi didikan dan pengajaran secara cukup? oleh sebab itu,

⁶⁹Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya. Al-Baqarah* :ayat 233(Bandung :CV Penerbit di Ponogoro, 2015) h.37 .

pendidikan dan pengajaran adalah merupakan wasilah yang tidak boleh tidak harus diperoleh oleh setiap Anak.

Sehubungan dengan ini, Umar Bin Khattab, Khalifah kedua dalam rangkaian Al-Khulafaurrasyidin, pernah mengatakan “termasuk hak Anak yang menjadi kewajiban orang tua, adalah mengajarkan menulis, memanah, dan tidak member rizqi kecuali yang halal baik.”

5. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan derajat

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata Allah berfirman dalam QS.

Al-Hujarat: 13 :



يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.(QS.Al-Hujarat:13)⁷⁰

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa setiap Anak mempunyai hak untuk diperlakukan secara adil. Orangtua tidak dibenarkan

⁷⁰Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya. Al-Hujarat :ayat 13* (Bandung :CV Penerbit di Ponogoro, 2015) h. 517.

lebih mengutamakan Anak laki-laki daripada perempuan, antara Anak sulung dengan yang lain.

6. Hak mendapatkan cinta kasih

Sudah menjadi fitrahnya bila setiap orangtua mencintai Anaknya. Walaupun demikian, Islam masih juga memerintahkan agar orangtua memperlihatkan perasaan cintanya kasihnya itu kepada Anak-Anaknya, sehingga Anak benar-benar merasa bahwa orangtuanya itu mencintai dan mengasihi. Setiap Anak punya hak untuk mendapatkandan merasakan wujud nyata dari perasaan cintakasih orangtuanya.

7. Hak untuk bermain

Anak adalah Anak, bukan orangtua berbadan kecil. Artinya, menurut alamiahnya, usia Anak adalah usia bermain. Pernyataan yang demikian dibenarkan oleh para ahli psikologi perkembangan maupun para ahli pendidikan. Untuk itu, sangatlah tidak dibenarkan bila orangtua dengan sengaja menjauhkan Anak-Anaknya dari dunia bermain ini. Setiap Anakpunya hak untuk bermain sesuaidengan tingkat perkembangan usiannya. Yang penting buat orangtua adalah bisa mengarahkan permainan Anak ini kearah yang positif. Misalnya bisa memperluas pengetahuan Anak.

Rasulullah SAW telah memberikan contoh yang indah dalam hal ini. Diriwayatkan, pada suatu hari Nabi memimpin

salat berjamaah. Waktu itu datanglah Hasan dan Husain, cucu-cucu beliau. Sewaktu Nabi sedang sujud, keduanya menaiki punggung beliau, dan Nabi memperpanjang sujud sampai kedua cucu tersebut turun dari punggung beliau, setelah selesai salat para sahabat bertanya kenapa beliau melakukan salah satu sujudnya lama sekali. Nabi menjawab: “kedua cucu saya naik ke punggung saya dan saya tidak tega menyuruh mereka turun”.

Dari kejadian itu dapat diambil pengertian bahwa Nabi tidak suka menjauhkan Anak-Anak dari dunia permainan, walaupun hal itu sangat mengganggu buat diri beliau. Masa kAnak-kAnak dalam Islam dilukiskan sebagai dunia yang indah yang terdiri atas kebahagiaan, khayal, cinta Allah terhadap Anak-Anak yang dikatakan dengan sumpah.

Merawat Anak adalah suatu kewajiban dan mencintai mereka mendekatkan seorang kepada Allah.⁷¹ Terbuktilah bahwa perhatian Allah terhadap Anak-Anak, membuat-Nya mencabut hukuman dari hamba-hambanya.

B. Tinjauan Pustaka

Dalam suatu penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya (penelitian terdahulu) yang berkaitan dengan penelitian.

⁷¹Dewan Ulama Al-Azhar, Ajaran Islam tentang Perawatan Islam (Bandung : al-Bayan, 1985), h. 16.

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan penelitian dengan judul yang sama seperti judul penelitian penulis. Namun penulis mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis. Hengki Komarudin yang berjudul “Upaya Perlindungan Anak oleh Pengelola rumah singgah Ahmad Dahlan terhadap Anak Jalanan” yang dibuat tahun 2012, di Yogyakarta. Dalam penelitian tersebut dengan penelitian penulis sama-sama mengkaji tentang Upaya Perlindungan Anak yang membedakan dalam penelitian Hengki Komarudin adalah tempat penelitian dan membahas tentang bagaimana mengelola rumah singgah Ahmad Dahlan terhadap Anak Jalanan, sedangkan penulis membahas Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 tahun 2012 tentang perlindungan Anak.

BAB III

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Profil Kantor Studi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Menurut Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 pasal 53 ayat (2) menyebutkan bahwa BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang kedudukan dibawah presiden dan bertanggung jawab kepada presiden yang memiliki tugas melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana pada pasal 54 ayat (1) menyebutkan dalam rangka pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana di Daerah Kota Bandar Lampung, pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung membentuk Badan Koordinasi Keluarga Berencana Daerah Kota Bandar Lampung yang disingkat BKKBD ditingkat Provinsi dan Kabupaten/ Kota.⁷²

Lembaga yang mengelola program kependudukan dan keluarga berencana ditingkat provinsi diselenggarakan oleh Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sedangkan ditingkat Kabupaten/Kota masih menggunakan struktur yang lama yaitu penggabungan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

⁷²Undang-Undang No 52 tahun 2009 perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, pasal 53 ayat (1).

Pelaksanaan program Keluarga Berencana(selanjutnya disingkat dengan KB) di Provinsi menjadi urusan pemerintah pusat sedangkan untuk Kabupaten/Kota, pelaksanaan programnya telah diserahkan kewenangannya kepada Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebagai pengganti Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung. Dengan adanya undang-undang ini menjadikan Daerah Kota Bandar Lampung melaksanakan sendiri urusan rumah tangganya (otonomi) yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Selanjutnya untuk Kota Bandar Lampung, SKPD (satuan kerja perangkat daerah) yang mengelola program tersebut adalah Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (BKKBPP). Dalam mengelola program tersebut, BKKBPP merupakan SKPD yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bandar Lampung dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung, Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tersebut, BKKBP kota Bandar Lampung menyelenggarakan program Keluarga Berencana (KB) dan Pemberdayaan Perempuan.⁷³

⁷³Irma Krisna Ningsih, Sip. MM wawancara sekretaris Dinas PP dan Pa kota Bandar

Dalam pelaksanaan program tersebut BKKBPP tidak terlepas dari instansi Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kota Bandar Lampung (BKKBPP) merupakan instansi Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota No. 2 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 3 tahun 2007.

Selanjutnya dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 01 Januari 2017 Pemberdayaan Perempuan menjadi sebuah dinas tersendiri menjadi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.⁷⁴

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung merupakan OPD (organisasi perangkat daerah) baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 06 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak baru dilaksanakan terhitung mulai 01 Januari 2017. Sebelumnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tergabung pada BKKB-PP Kota Bandar Lampung.

Lampung, 19 Agustus 2019.

⁷⁴Irma Krisna Ningsih wawancara sekretaris Dinas PP dan Pa kota Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bandar Lampung adalah unsur pelaksana tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Kota di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.

Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandar Lampung, dan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 45 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas, dan Fungsi perangkat Daerah Kota Bandar Lampung. Tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung adalah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan urusan pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan.

B. Visi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung .

1. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan Anak dalam berbagai bidang.

2. Meningkatkan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik
3. Mengupayakan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan Anak
4. Mengupayakan keadilan ekonomi bagi perempuan
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan Anak.
6. Melakukan perencanaan keluarga secara cermat sehingga pertambahan dan Anak.⁷⁵

C. Data kekerasan pada Anak di kota Bandar Lampung

Berdasarkan data yang peneliti dapatkan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah sebagai berikut :

Kasus kekerasan perempuan dan Anak di kota Bandar Lampung pada tahun 2018 berjumlah 36 kasus kekerasan.⁷⁶

D. Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

- | | |
|------------------------------------|----------------------|
| 1. Kepala Dinas | : Dra. Sri Aisyah |
| 2. Sekretaris | : Ningsih, Sip.M.M |
| 3. Program Dan Informasi | : Dra. Mariyati |
| 4. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | : Elma Lokalena, S.H |
| 5. Sub Bagian Keuangan | : Desi Restika , S.E |
| 6. Bidang Kualitas Hidup Perempuan | : Ima Fatimah, S.Sos |

⁷⁵Irma Krisna Ningsih, wawancara sekretaris Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung, 19 Agustus 2019.

⁷⁶Dokumen Dinas PP dan Pa tahun 2018

- | | |
|-------------------------------------|----------------------|
| 7. Bidang Perlindungan Perempuan | : Darati, S.os |
| 8. Bidang Pemenuhan Hak Anak | :Roth Dora, S.E |
| 9. Bidang Pengarusutamaan Gender | : Erwan, S.H |
| 10.Seksi Perlindungan Hak Perempuan | : Yuliana |
| 11.Seksi Pemenuhan Hak Anak | : Tri Ismanti, SE |
| 12.Seksi Pencegahan Kekerasan | : Neti Gustria, S.os |
| 13.Seksi Pengumpulan Data Anak | : Eli Wati, S.H.M.H. |

E. Pelaksanaan Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Bandar Lampung

Dalam pelaksanaan tugas pokok, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak
3. Pembinaan, fasilitasi, sosialisasi, distribusi dan pelaksanaan tugas di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga, Bidang Perlindungan Perempuan, Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak

4. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Bidang Data, Informasi Gender dan Anak
5. Pelaksanaan Kesekretariata Dinas dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.⁷⁷

Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

1. Program pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan:
 - a. Penguatan peran Organisasi Dharma Wanita kota Bandar Lampung
 - b. Penguatan peran Organisasi Perempuan dibidang sosial
 - c. Penguatan gabungan Organisasi Wanita di kota Bandar Lampung
 - d. Penguatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan korban tindak kekerasan
 - e. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
2. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga:
 - a. Peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera
 - b. Komunikatif, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender (PUG)

⁷⁷Irma Krisna Ningsih, wawancara sekretaris Dinas PP dan Pa kota Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

- c. Pemberdayaan peran perempuan di kawasan pesisir pantai
 - d. Pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif bagi perempuan kota Bandar Lampung.
3. Program data dan informasi gender dan Anak:
- a. Penyusunan buku profil PPPA
 - b. Penguatan kader perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).

Upaya yang telah dilakukan Dinas Perempuan dan Perlindungan Anak:

- 
- 1. Terlaksananya peningkatan keterampilan melalui pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan.
 - 2. Terlaksananya penguatan peran organisasi perempuan melalui peningkatan kapasitas kader dalam kepedulian masalah sosial di masyarakat.
 - 3. Terlaksananya peningkatan keterampilan bagi perempuan dan keluarga.
 - 4. Peningkatan kapasitas Aktivis perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat.

Lembaga yang menaungi korban kekerasan ada Anak:

- 1. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
- 2. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA).
- 3. Telephone Sahabat Anak (TELSA).

4. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

Di dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 02 tahun 2016 bahwasanya Pencegahan sebagaimana dimaksud meliputi antara lain:⁷⁸

1. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
2. meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
3. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan Anak;
4. meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
5. meningkatkan kemampuan Anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam.

Kebijakan, program, dan mekanisme sebagaimana dimaksud meliputi antara lain :⁷⁹

1. pencegahan, pengawasan, pengaduan/pelaporan dan pengembangan data masalah perlindungan Anak;
2. penanganan secara terpadu untuk Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran serta Anak disabilitas;

⁷⁸Peraturan daerah No. 2 tahun 2016 kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan Anak, pasal 5

⁷⁹Peraturan daerah No. 2 tahun 2016 kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan Anak, pasal ayat (3)

3. jaminan pemenuhan hak setiap Anak yang menjadi korban kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran;
4. penyelenggaraan dukungan untuk keluarga korban tindak kekerasan;
5. upaya untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan perlindungan Anak.

Sosialisasi, edukasi dan informasi sebagaimana dimaksud dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan sikap masyarakat mengenai:⁸⁰

1. hak-hak Anak, perlindungan Anak, dan pengasuhan Anak;
2. dampak buruk kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran Anak

Meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan Anak sebagaimana dimaksud, meliputi pengembangan kapasitas kelembagaan dan tenaga penyedia layanan, meliputi antara lain :⁸¹

1. tenaga penyedia layanan kesehatan;
2. tenaga penyedia layanan pendidikan;
3. tenaga penyedia layanan rehabilitasi sosial dan psikologis;
4. tenaga penyedia layanan pengasuhan;
5. tenaga penyedia layanan bantuan hukum;
6. Dalam penanganan dan pembinaan khusus Anak jalanan tetap

berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Kota

⁸⁰Peraturan daerah No. 2 tahun 2016 kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan Anak, pasal ayat (4)

⁸¹*Ibid*

Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2010 tentang pembinaan Anak jalanan dan pengemis.

F. Sarana dan Prasarana

1. Kota Layak Anak

Untuk mewujudkan Pemenuhan Hak Anak secara terpadu dan sistematis dari seluruh sektor secara berkelanjutan dilaksanakan melalui kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak.

Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana pada memuat tentang:⁸²

- a. Konsep Kota Layak Anak ;
- b. Hak Anak; dan
- c. Pendekatan pengembangan Kota Layak Anak .

Dalam rangka mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 2 tahun 2016 pasal 22 lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Kebijakan pengembangan Kota Layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster antara lain :

- 1) Hak sipil dan kebebasan;
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya;⁸³

⁸²Erwan, wawancara, Bidang bidang data informasi bidang gender dan anak Dinas PP dan Pa kota Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

⁸³Peraturan daerah kota Bandar Lampung No. 2 tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak pasal 22

5) Perlindungan khusus.

2. Partisipasi Anak

Pengembangan partisipasi Anak dalam penyelenggaraan perlindungan Anak dilakukan untuk meningkatkan kecakapan hidup melalui:

- a. penyediaan kesempatan bagi Anak untuk terlibat dalam kegiatan pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan;
- b. mendorong keterlibatan penyelenggara pendidikan, penyelenggara perlindungan Anak, dan lembaga masyarakat dalam pengembangan kemampuan partisipasi Anak;
- c. memfasilitasi pengembangan kemampuan Anak dalam berpartisipasi melalui organisasi Anak (Forum Anak Daerah Kota Bandar Lampung) termasuk Anak yang disabilitas.
- d. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan , Dinas Sosial, Dinas Pendidikan atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berkewajiban untuk penyelenggaraan pengembangan partisipasi Anak.⁸⁴

G. Gambaran Cakupan Kegiatan atau Wilayah Pelayanan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan kota Bandar Lampung

Kegiatan dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Perempuan kota Bandar Lampung meliputi dua urusan yaitu urusan perempuan dan

⁸⁴ Buku Pedoman Dinas PP dan Pa Kota Bandar Lampung

Anak atau Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Urusan Pemberdayaan Perempuan meliputi Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan, dan Program Peningkatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak. Urusan Anak meliputi program perlindungan terhadap Anak, melindungi hak-hak Anak serta menjaga kualitas hidup Anak sebagai penerus bangsa.

H. Faktor-faktor penghambat dan pendorong Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung

Selanjutnya berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwasannya faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah :

Pendorong :

1. Adanya komitmen kepala Daerah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan instansi terkait melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

3. Adanya komitmen kepala Daerah Kota Bandar Lampung untuk mengembangkan Kota Layak Anak.⁸⁵

Penghambat :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
2. Terbatasnya anggaran dari pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Terbatasnya pegawai yang melayani penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, terhadap perempuan dan Anak.

I. Data Responden

Mengenai data responden wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa para narasumber yang menjadi salah satu objek penelitian, beberapa diantaranya:

1. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung bernama Irma Krisna Ningsih, Sip.MM, beralamat di jalan Purnawirawan II , dalam wawancara beliau menjelaskan tentang profil kantor, visi misi , dan struktur organisasi dinas PP dan Pa kota Bandar Lampung.
2. Bidang Pemenuhan Hak Anak, bernama Roth Dora, SE beralamat di jalan Blora No. 11 , dalam wawancara beliau menjelaskan tentang Faktor Penghambat dan Pendorong Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

⁸⁵Roth Dora, wawancara, Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas PP dan Pa kota Bandar Lampung, 19 Agustus 2019

3. Bidang bidang data informasi bidang gender dan Anak, bernama Erwan, S.H ,dalam wawancara beliau menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang diberikan oleh dinas dinas PP dan Pa kota Bandar Lampung.

J. Data Wawancara dari Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung

Berdasarkan hasil wawancara di jelaskan oleh Roth Dora selaku kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung.

1. Apa saja program kerja kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung:

“di dalam program kerja kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung bisa di lihat di dokumen kantor kami yaitu.”

a. Program pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan:

- 1) Penguatan peran Organisasi Dharma Wanita kota Bandar Lampung
- 2) Penguatan peran Organisasi Perempuan dibidang sosial
- 3) Penguatan gabungan Organisasi Wanita di kota Bandar Lampung
- 4) Penguatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan korban tindak kekerasan
- 5) Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

b. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga:

- 1) Peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera
- 2) Komunikatif, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender (PUG)

- 3) Pemberdayaan peran perempuan di kawasan pesisir pantai
- 4) Pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif bagi perempuan kota Bandar Lampung.

c. Program data dan informasi gender dan Anak:

- 1) Penyusunan buku profil PPPA
 - 2) Penguatan kader perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).
-
2. Kapan di laksanakan Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung
“pada tahun 2016 karena kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung baru berjalan pada tahun 2016”
 3. Menurut Ibu apakah sudah efektif Perda 02 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak?
“sebenarnya saya belum bisa bilang efektif atau tidaknya karena masyarakat juga belum tentu tahu tentang Perda tersebut, dan kami sebagai pemerintah berusaha semaksimal mungkin menjalankan perda tersebut melalui program-program kami.”
 4. Berdasarkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung apakah kekerasan pada Anak meningkat atau menurun setiap tahunnya?
“ sebenarnya banyak sekali kasus kekerasan pada Anak tetapi masyarakat belum banyak yang melapor dan data yang kami punya jumlah nya sedikit, dan berbeda dari data dari pihak kepolisian, mungkin jika keseluruhannya digabungkan banyak sekali kasus-kasus kekerasan pada Anak”
 5. Apa penyebab kasus kekerasan meningkat setiap tahunnya?
”karena faktor dari sumber daya manusia dan lingkungan keluarga yang menganggap kekerasan menjadi kebiasaan itu

sendiri yang menjadi faktor utamanya. Misalnya terjadi masalah di dalam keluarga dan Anak yang menjadi sasaran orangtua”

6. Dalam bentuk apa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung melakukan perlindungan terhadap anak?

“ kita melakukan pencegahan agar tindak kekerasan tidak terjadi pada Anak, dan kita melakukan sosialisasi antar kelurahan dan memberikan pos curhat yang diadakan di setiap kelurahan-kelurahan di kota Bandar Lampung”

BAB IV

ANALISIS PENELITIAN

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Menurut peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak pasal 1 ayat 17 bahwasanya Penyelenggaraan perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindak kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap Anak.⁸⁶Pemerintah harus bertanggungjawab atas perlindungan Anak yang berada di Daerah Kota Bandar Lampung maupun kota.

Dalam pasal 3 penyelenggaraan perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak Anak secara sistematis, terintegrasi, berkesinambungan atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran .

⁸⁶Peraturan daerah No 2 tahun 2016 kota Bandar Lampung penyelenggaraan perlindungan Anak, pasal 1 ayat (17)

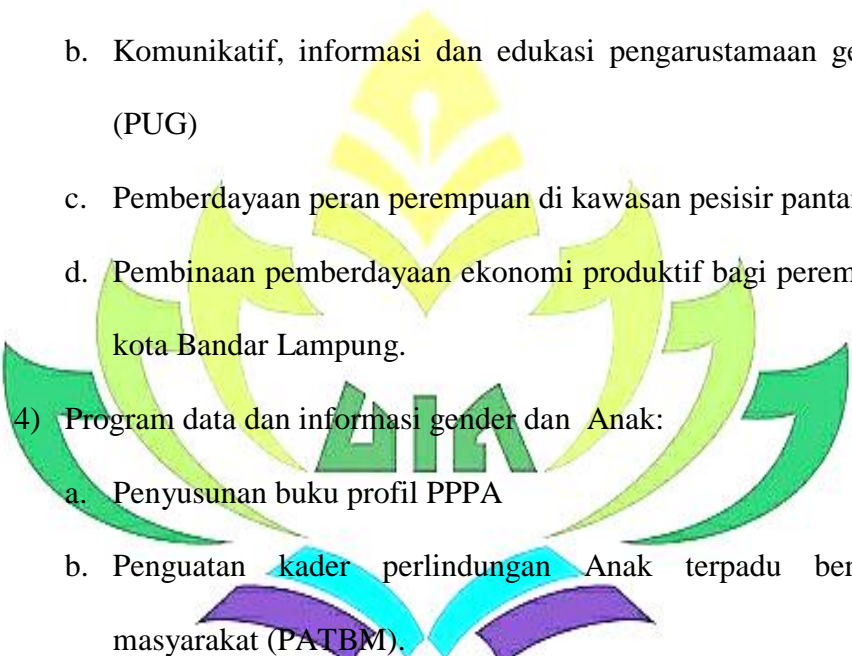
Di dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung 02 tahun 2016 bahwasanya Pencegahan sebagaimana dimaksud meliputi antara lain:⁸⁷

1. merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme;
2. meningkatkesadaran dan sikap masyarakat serta keluarga melalui sosialisasi, edukasi dan informasi;
3. meningkatkan kapasitas pelayanan perlindungan Anak;meningkatkan kemampuan Anak untuk mengenali resiko dan bahaya dari situasi atau perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran;
4. meningkatkan kemampuan Anak dalam menyelesaikan masalah, menyesuaikan diri dengan perubahan, dan respon terhadap situasi yang mengancam.

Program kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi :

- 2) Program pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan:
 - a. Penguatan peran Organisasi Dharma Wanita kota Bandar Lampung
 - b. Penguatan peran Organisasi Perempuan dibidang sosial
 - c. Penguatan gabungan Organisasi Wanita di kota Bandar Lampung

⁸⁷Peraturan daerah No. 2 tahun 2016 kota Bandar Lampung tentang penyelenggaraan perlindungan Anak, pasal 5

- d. Penguatan Pemenuhan Hak dan Perlindungan korban tindak kekerasan
 - e. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
- 3) Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga:
- a. Peningkatan peran perempuan menuju keluarga sehat sejahtera
 - b. Komunikatif, informasi dan edukasi pengarusutamaan gender (PUG)
 - c. Pemberdayaan peran perempuan di kawasan pesisir pantai
 - d. Pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif bagi perempuan kota Bandar Lampung.
- 4) Program data dan informasi gender dan Anak:
- a. Penyusunan buku profil PPPA
 - b. Penguatan kader perlindungan Anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM).
- 

Menurut pasal 22 ayat 1 Kebijakan pengembangan kota layak Anak diarahkan pada pemenuhan hak-Anak yang terbagi dalam 5 (lima) kluster antara lain :⁸⁸

- 1) Hak sipil dan kebebasan
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- 3) Kesehatan dasar dan kesejahteraan

⁸⁸Perda No. 2 tahun 2016 pasal 22

- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya dan
- 5) Perlindungan khusus.

Berdasarkan pengamatan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kota Bandar Lampung bahwasannya pemerintah sudah melaksanakan Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak melalui program kerja semaksimal mungkin dalam pencegahan Perlindungan Anak. Namun kekerasan pada Anak terjadi karena faktor lingkungan keluarga serta kurangnya kesadaran masyarakat dan kurangnya pengetahuan tentang peraturan daerah tersebut oleh masyarakat yang mengakibatkan kurangnya efektivitas Implementasi terhadap Peraturan Daerah No. 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak kota Bandar Lampung .

B. Faktor-faktor penghambat dan pendorong Penyelenggaraan Perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung

Pendorong :

1. Adanya komitmen kepala Daerah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan instansi terkait melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
3. Adanya komitmen kepala Daerah Kota Bandar Lampung untuk mengembangkan Kota Layak Anak.

Penghambat :

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
2. Terbatasnya anggaran dari pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
3. Terbatasnya pegawai yang melayani penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, terhadap perempuan dan Anak.

Faktor penghambat penyelenggaraan perlindungan Anak Dinas pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kota Bandar Lampung adalah terbatasnya sumber daya manusia yang ada pada Sub bagian perlindungan Anak yang menangani masalah Anak. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan kegiatan perlindungan dan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

faktor pendorong penyelenggaraan perlindungan Anak Dinas pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak di Kota Bandar Lampung terlaksana sesuai dengan peraturan Daerah Kota Bandar Lampung yang terkait dengan program kerja Dinas pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak.

C. Pandangan *Fiqh Siyasah* dan Hukum Positif di Indonesia Terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Anak adalah anugerah sekaligus amanah yang diberikan Allah SWT kepada setiap orang tua. Berbagai cara dan upaya dilakukan orang tua agar dapat melihat Anak-Anaknya tumbuh dan berkembang

sebagaimana mestinya. Perlindungan Anak dalam Islam merupakan perlindungan secara fitrah.

Dalam pasal 3 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 tahun 2016 penyelenggaraan perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak Anak secara sistematis, terintegrasi, berkesinambungan atas perlindungan dari kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran.

Perlindungan dalam Islam meliputi fisik, psikis, intelektual, moral, ekonomi dan lainnya, hal ini dijabarkan dalam bentuk memenuhi semua hak-haknya, menjamin kebutuhan sandang dan pangannya, menjaga nama baiknya dan martabatnya menjaga kesehatannya menghindari diri dari kekerasan dan lain-lainnya. Sesuai dengan pengertian *Siyasah Dusturiyah* yaitu keputusan kepala Negara dalam mengambil keputusan atau Undang-Undang bagi kemaslahatan umat. Bahwa dalam surat Allah QS. An-Nisa ayat 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ ضَعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

*Artinya :hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*⁸⁹

⁸⁹Departemen Agama. *Al-Qur'an dan terjemahnya. Al-kahfi* ayat 46 (Bandung :CV Penerbit di Ponogoro, 2015) h.301 .

Berdasarkan ayat diatas bahwa praktik penyelenggaraan perlindungan Anak di Kota Bandar Lampung sudah sesuai dengan *QS.An-nisa* ayat 9. Bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya mengenai efektivitas implementasi terhadap Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak dapat di peroleh kesimpulan :

1. Di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 02 tahun

2016 pasal 5 tentang penyelenggaraan perlindungan Anak bahwasanya di dalam pasal 5 meliputi Pencegahan, sebagaimana yang dimaksud antara lain, merumuskan kebijakan, program, dan mekanisme.

Dalam melaksanakan penyelenggaraannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak telah melakukan Program kerja yaitu:

- a. Program pemenuhan hak dan perlindungan Perempuan:
- b. Program peningkatan kualitas hidup perempuan dan keluarga:
- c. Program data dan informasi gender dan Anak:

2. Faktor pendorong dan penghambat penyelenggaraan perlindungan Anak.

a. Faktor Pendorong

1. Adanya komitmen kepala Daerah Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan Perlindungan Perempuan dan Anak.

2. Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dan instansi terkait melalui lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak.
3. Adanya komitmen kepala Daerah Kota Bandar Lampung untuk mengembangkan Kota Layak Anak.

c. Faktor Penghambat

1. Rendahnya kualitas sumber daya manusia.
2. Terbatasnya anggaran dari pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung
3. Terbatasnya pegawai yang melayani penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, terhadap perempuan dan Anak..
3. Pandangan *Fiqh Siyasah* terhadap tentang penyelenggaraan perlindungan Anak

Dalam pandangan *Fiqh Siyasah* mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak tertuang dalam *QS.An-Nisa* ayat 9. Bahwa pemerintah sebagai pihak penyelenggara sudah melakukan dengan semaksimal mungkin dalam menjalankan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 02 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan maka, peneliti menyarankan sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada petugas dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk lebih banyak bersosialisasi kepada masyarakat agar mengurangi terjadinya kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah pada Anak.
2. Diharapkan kepada petugas dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung agar mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Salim Abdul Muin. *Fiqh Siyasah Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an* Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Munir Abdul Salim. *Fiqh Siyasah Konsepsi Politik dalam AL-Quran*. Raja Yogyakarta:Grafindo. 2016.

Suyanto Bagong,*Masalah Sosial Anak*,(Jakarta: Kencana, 2013).

Narbuko Cholid dan Achmadi Abu, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, , (Jakarta: Akademika Presindo,1989).

Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekeraan Seksual Terhadap Anak*,(Jakarta : cahaya abadi. 2015),

Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010).

Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma,2005).

Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung:Mandae Maju, 1996),Cet. Ket-VII.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekan Proposal*,(Jakarta:Bumi Aksara,2004), Cet. Ke-VII.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Pt. Citra Aditya Bakti, 2004.

Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politi Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014).

Taufiq Muhammad Makarao, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka cipta), h.105.

Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2010)

Rizal. *Pengantar Fiqh Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia.

201

Saebani Beni. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik*. Bandung: Pustaka Setia. 2013.

Sugiono, *Metode Penelitian bisnis, cetakan ke 14* (Bandung: Alfabeta, 2009).

Suharsimi Arkunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, 191), hlm. 102

Sujarweni V, Wiratna, *Metode Penelitian Lengkap, Praktis, dan Mudah Dipahami*, (Yogyakarta: Pustaka Baru press, 2014).

Susiadi, *Metode Penelitian* (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015).

2010. al-Zuhayli. Wahbah *Ushul al-Fiqh al-islami*. Damaskus: Daral-Fikr

Anwar Yesmil dan Adang. *Pembaharuan Hukum Pidana* Jakarta. Grasindo .2008 .

B. Ensiklopedia dan kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, 2011)

C. Peraturan Perundang-undangan

Perda Kota Bandar Lampung no 02 tahun 2016 Tentang *Penyeleggaraan Perlindungan Anak*

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.
Jakarta: Sinar Grafika, 2003, h.1.

D. Jurnal

Laurensius Arliman S, 2015, Konsep Dan Gagasan Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Oleh Pemerintah Daerah Di Perbatasan NKRI, Tanjung Pinang, Universitas Maritim Raja Ali, Jurnal Ilmu Hukum Selat, Volume: 3, Nomor: 1, Edisi: 5, h.341

Laurensius Arliman S, 2015, Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Pada Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat), Bandung: Universitas Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum, Volume: 2, Nomor: 2, h. 371.

Eny Kusdarini, M.Hum: Perlindungan Anak di Indonesia sebagai perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah, dalam jurnal Civics Volume 2, Nomor 1. Juli 2015

E. Website

www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/, diakses tanggal 05 Juli 2019

<http://www.artikelsiana.com/2014/10/pengertian-peran-definisi-fungsi-apa-itu.html?m=1>, diakses tanggal 05 Juli 2019

"*pengertian-peran-definisi-fungsi-apa itu*" (On-line), tersedia di: <http://www.artikelsiana.com/>, diakses tanggal 05 Juli 2019

www.definisimenurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/, diakses tanggal 05 Juli 2019

"*Kekerasan terhadap anak di mata anak indonesia*" (On-line), tersedia di : <https://tirto.id/unicef-soroti-kekerasan-terhadap-anak-oleh-aparat-saat-demonstrasi-ei5F>, diakses tanggal 05 Juli 2019

Pendidikan Agama islam (On-line), tersedia di : <https://zenodo.org/record/1161556> / diakses tanggal 08 mei 2019

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak" (Online) tersedia di: <https://www.kemenpppa.go.id/>, diakses tanggal 05 Juli 2019

F. Wawancara

Erwan, wawancara dengan bidang data informasi bidang gender dan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung, 19 Agustus 2019.

Irma Krisna Ningsih, wawancara dengan sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung, 19 Agustus 2019.

Roth Dora, wawancara dngan Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Bandar Lampung, 19 Agustus 2019.

